

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bendahara Umum Negara mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN) diatur dalam pasal 1 ayat 15 UU Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara. Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dapat mengangkat kuasa Bendahara Umum Negara guna melaksanakan tugas kebendaharaan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas kebendaharaan sendiri meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang serta surat berharga. Dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dimana KPPN akan memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melayani tagihan-tagihan yang menjadi beban Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dimana harus terdapat dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang nantinya akan diajukan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan terdiri dari 5 (lima) tipe, yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi.

KPPN Mojokerto merupakan salah satu Instansi yang masuk kedalam kategori KPPN tipe A1 yang mempunyai tugas dan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN Mojokerto sendiri dalam melaksanakan tugasnya telah memberikan layanan berupa *Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)* dimana pada aplikasi tersebut telah dilengkapi layar monitor penyelesaian SPM/SP2D yang bisa menampilkan status dokumen yang diajukan, alur penyelesaian SP2D, mekanisme pembayaran APBN, kotak pengaduan, alur/mekanisme penyelesaian pengaduan, dan kotak kepuasan pelayanan.

KPPN Mojokerto selaku Kuasa BUN melaksanakan pengujian substansif atas SPM yang telah diterbitkan oleh KPA. Apabila SPM yang diterbitkan dinyatakan lulus uji maka KPPN wajib menerbitkan SP2D yang mana menjadi dasar untuk bank guna mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN yang kemudian akan dipindahkan ke rekening pihak ketiga, namun jika SPM yang diajukan tidak lulus uji maka SPM harus dikembalikan kepada KPA dengan surat yang telah ditandatangani oleh kepala KPPN guna dilakukannya perbaikan dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada saat akan dilakukannya penerbitan SP2D yang diserahkan ke Bank Operasional sehingga penerbitan SP2D ditolak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, kesalahan pada saat memasukkan no rekening, kesalahan dalam penulisan nama, dan adanya perbedaan antara nama dan nomor rekening, yang mana hal ini mengakibatkan bank menolak ketika melakukan pemindahbukuan dana atas SP2D ke rekening penerima sehingga terjadi retur SP2D. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di KPPN Mojokerto karena peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian retur SP2D di KPPN Mojokerto.

Fenomena yang sering terjadi pada KPPN Mojokerto pada saat akan dilakukannya penerbitan SP2D yaitu terjadinya kesalahan ketika merekam kode akun satuan kerja pada aplikasi OM-SPAN. Hal ini mengakibatkan dana yang seharusnya cair pada hari itu harus tertunda yang mana ini merugikan pihak ketiga karena terlambat dalam menerima dana dan harus mengurus dokumen-dokumen persyaratan supaya dana SP2D bisa segera dicairkan. Maka dari fenomena yang terjadi judul yang diambil adalah **”PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR (SP2D) PADA KPPN MOJOKERTO”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penyelesaian retur SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto?

- b. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penyelesaian retur SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada saat melakukan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto..

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- b. Bagi STIE Perbanas Surabaya, diharapkan manfaat pada penelitian ini dapat menambah referensi dan sebagai acuan untuk mahasiswa lain yang akan menyusun tugas akhir pada masa yang akan datang.
- c. Bagi pembaca, diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca terutama pada prosedur retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai definisi prosedur, pencairan dana, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sistem mekanisme dan prosedur SP2D, Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan prosedur penyelesaian retur SP2D.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian akan dijelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, *job description* dan profil usaha.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini memuat simpulan, saran dan implikasi penelitian. Saran penelitian ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan agar menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.